

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI DI PERGURUAN TINGGI NEGERI (Studi Kasus Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps)

ARAZID (2310622071), Pembimbing 1 (Heru Sugiyono), Pembimbing 2 (Ahmad Ahsin Thohari)

Penulisan Tesis ini dilatarbelakangi karena adanya Pungutan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan/atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Jalur Mandiri di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Udayana Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara. Rumusan Masalah Tesis ini yaitu Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Penyelewengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Perguruan Tinggi Negeri dan Bagaimana Tanggungjawab Rektor dalam Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Perguruan Tinggi Negeri Terkait Pungutan Iuran Pengembangan Institusi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Berdasarkan dua permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 51/PMK.05/2015 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 95/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan Tahun Akademik 2022/2023 yang menjadi dasar Penerapan Penyusunan Tarif Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan/atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI), akibat yang timbul dari Penggunaan dan Pengelolaan Penetapan Tarif Layanan yang dimaksud, karena itu Pejabat PPK-BLU dan Rektor sebagai selaku Pemimpin yang bertanggungjawab penuh dalam Penetapan Tarif Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan/atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang menerapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan Keputusan Rektor pada Laman Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Mandiri di Universitas Udayana, sehingga menurut peneliti harus ada pembaharuan Hukum dalam mengatur dan mengawasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dalam Ruanglingkup Perguruan Tinggi Negeri secara tegas dan Transparan, Konsekuensi yang diterima jika pada akhirnya Pejabat Pelaksana Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (PPK-BLU) dan Rektor selaku Pejabat yang mempunyai Kuasa Pengguna Anggaran terkait Proses Penerapan Penyusunan Tarif Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan/atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang merugikan Keuangan Negara, maka jika terjadi atau ditemukan Pelanggaran Hukum dapat dikenakan sanksi Pidana maupun Perdata tergantung jenis Pelanggaran yang dilakukan.

Kata Kunci: Badan Layanan Umum, Pertanggungjawaban, Keuangan Negara

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY FOR FINANCIAL MANAGEMENT OF PUBLIC SERVICE AGENCIES FOR NEW INDEPENDENT STUDENTS IN STATE UNIVERSITIES

(Deeision Study No 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps)

Arazid (2310622071), Pembimbing 1 (Heru Sugiyono), Pembimbing 2 (Ahmad Ahsin Thohari)

The writing of this thesis is motivated by the levying of Institutional Development Contributions (SPI) and / or Institutional Development Fees (IPI) for New Independent Path Students at Udayana University State Universities Which Caused State Financial Losses. The formulation of this thesis problem is how the Public Service Agency Financial Management System in State Universities related to the Collection of New Independent Student Institution Development Fees and how the Rector's Responsibility in the Financial Management of Public Service Agencies in State Universities related to the Collection of New Independent Student Institution Development Fees. The research method used in writing this thesis is Normative Juridical Legal Research medote. Based on these two problems, it can be concluded that the provisions of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia NUMBER 51 / PMK.05 / 2015 as amended by the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia NUMBER 95 / PMK.05 / 2020 concerning Service Tariffs of Public Service Entities. /2020 concerning Service Tariffs of the Udayana University Public Service Agency for the 2018/2019 Academic Year up to the 2022/223 Academic Year which is the basis for the Application of Tariff Preparation for Institutional Development Contributions (SPI) and / or Institutional Development Fees (IPI), the consequences arising from the Use and Management of the Determination of Service Tariffs in question, therefore the PPK-BLU Officer and the Chancellor as the Leader who is fully responsible for determining the Tariff for Institutional Development Contributions (SPI) and /or Institutional Development Fees (IPI).

Keywords: Public Service Agency, Accountability, State Finance